



USIR WTO

DARI PERTANIAN
PERJUANGAN RAKYAT MENUJU KTM VII WTO

MUHAMMAD IKHWAN

SERIKAT PETANI INDONESIA
2010

USIR WTO DARI PERTANIAN

Perjuangan Rakyat Menuju KTM VII WTO

Muhammad Ikhwan

**SERIKAT PETANI INDONESIA
2010**

Judul buku:
USIR WTO DARI PERTANIAN
Perjuangan Rakyat Menuju KTM VII WTO

Cetakan pertama, Mei 2010

Penyusun:
Muhammad Ikhwan

Desain Sampul & Tata Letak:
Hadiedi Prasaja

Editor:
Tita Riana Zen

Penerbit:
SERIKAT PETANI INDONESIA
Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5 Jakarta Selatan 12790
Telp. 021-7991890 Fax. 021-7993426
email: spi@spi.or.id
www,spi.or.id

Diedarkan untuk kalangan internal organisasi

DAFTAR ISI

1. Indonesia di bawah ketiak liberalisasi pertanian.....	2
2. Ketidakadilan di dalam WTO.....	12
3. Liberalisasi pertanian yang membunuh dan melanggar hak asasi petani.....	25
4. Menuju KTM 7 WTO: Pemerintah tak berdaya melawan liberalisasi.....	36
5. Alternatif kedaulatan pangan menghempang WTO.....	41
6. Agenda menuju KTM 7 WTO.....	54
Galeri Foto.....	57

Daftar singkatan:

- ADM** : *Archer Daniels Midland*
Salah satu perusahaan agribisnis besar di dunia
- GMO** : *Genetically Modified Organism*
Organisme hasil rekayasa genetik
- IMF** : *International Monetary Fund*
(Badan Moneter Internasional)
- KTM** : Konferensi Tingkat Menteri
- LIPI** : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- NTP** : Nilai Tukar Petani
- PDB** : Produk Domestik Bruto
- SPI** : Serikat Petani Indonesia
- WTO** : *World Trade Organization*
(Organisasi Perdagangan Dunia)

Di bawah liberalisasi selama lebih kurang 14 tahun, WTO, Bank Dunia dan IMF merajalela di Indonesia. Kelaparan dan kemiskinan meningkat. Petani gurem meningkat menjadi sekitar 25,3 juta keluarga tani. Satu dari enam penduduk dunia saat ini menderita kelaparan.

1. Indonesia di bawah ketiak liberalisasi pertanian

Pertanian dan pangan adalah hajat hidup orang banyak. Di Indonesia, sekitar 46 persen dari total angkatan kerja bergerak di sektor ini, yang artinya berjumlah hampir 100 juta jiwa. Pertanian juga merupakan jalan hidup, yang ditandai dengan kuatnya budaya masyarakat Indo-

nesia yang agraris. Walaupun sumbangan terhadap Produk Domestik Bruto turun-naik--pada tahun 2008 nilainya sebesar 14.39 persen (atau 713.3 trilyun dari total PDB 4.954 trilyun rupiah)—mayoritas rakyat di pedesaan masih menggantungkan dirinya pada pertanian. Pertanian (dan pangan) ini pula yang menjadi basis industri kecil dan menengah, terutama untuk menggerakkan perekonomian rakyat di pedesaan. Beberapa produk yang hasil pertanian dalam negeri—terutama yang dikategorikan dalam sembilan bahan pokok (sembako)—sangat krusial karena menyangkut hidup-mati 230 juta lebih rakyat Indonesia yang hidup di desa maupun perkotaan.

Namun potret yang tersaji pada sektor pertanian dan pangan ini sangat buram. Di seluruh dunia, sekitar separuh dari total jumlah kelarapan adalah petani kecil (*UN Millenium Project*, 2005). Di Indonesia, sekitar 41,7 juta rakyat berada di bawah garis kemiskinan (atau 21,92 persen) pada tahun 2008 (LIPI, 2008).

Sementara menurut *UN Millenium Development Project*, 80 persen dari penderta kemiskinan akut berada di pedesaan. Sebagai catatan, sekitar 25,3 juta keluarga tani Indonesia adalah petani gurem—yang hanya punya lahan kurang dari setengah hektar untuk penghidupan keluarganya sehari-hari. Nilai Tukar Petani (NTP) juga berfluktuasi

di angka yang cukup rendah, menandakan pendapatan petani tak sebanding dengan pengeluarannya. Di banyak daerah, kasus kelaparan dan malnutrisi terjadi di pedesaan, bahkan di daerah lumbung pangan.

Krisis pangan dan krisis lainnya, seperti krisis iklim dan krisis finansial, disebabkan beberapa faktor—yang salah satu diantaranya adalah liberalisasi yang dipaksakan oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, IMF dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Spekulasi dan liberalisasi—terutama dalam praktek perdagangan komoditas pertanian dan pembukaan pasar negara-negara menghancurkan pasar dan harga domestik, me-

ngancam kedaulatan pangan rakyat, serta membuat perdagangan pertanian makin tidak adil. Spekulasi dan liberalisasi semasa krisis hanya dilakukan oleh pemain besar dan perusahaan transnasional besar, bukan oleh petani. Sebaliknya, dampak terbesar dari krisis ini dialami oleh petani, hingga konsekuensinya adalah peningkatan pelanggaran hak atas pangan rakyat—satu dari enam orang di dunia saat ini menderita kelaparan, yang mana jumlahnya mencapai 1 milyar jiwa lebih.

Dalam rejim WTO, dari tahun 2005 hingga saat ini kecenderungan pembukaan pasar kita semakin besar. Jika kita lihat perdagangan produk pertanian, Indonesia kini sangat ter-

gantung pada impor, setidaknya pada beberapa komoditi yang termasuk dalam sembako. Untuk komoditas beras kita cenderung aman, setidaknya impor berhenti pada tahun 2008 (sebelumnya kita masih tergantung impor, bahkan terbesar di dunia hingga tahun 2007). Gula, kita masih mengimpor dan ketergantungannya mencapai 30 persen dari kebutuhan nasional. Untuk susu dan produknya kita bahkan masih tergantung pada impor hingga 70 persen. Garam ketergantungan impornya sebesar 50 persen. Sementara itu, untuk kedelai kita bergantung pada impor sebesar 45 persen, daging sebesar 28 persen dan jagung 15 persen.

Hal ini menyebabkan pertanian kita tak maju-maju, yang dampak lebih besarnya juga pada perekonomian dan pembangunan pedesaan. Saat pertanian dan pangan di Indonesia belum bisa bersaing, belum dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan merangsang pasar domestik, kita malah terjun ke dalam pasar global di bawah ketiak WTO.

Pemain-pemain industri pertanian dunia yang diwakili perusahaan transnasional raksasa dari Amerika Serikat, Uni Eropa, Australia, Selandia Baru (dan bahkan Cina serta Brazil) tentunya dengan gampang mengalahkan Indonesia. Banjir impor menghancurkan pasar dan harga domestik, perta-

nian akhirnya jadi lesu—hingga saat ini. Petani kecil terus menderita.

WTO TIDAK ADIL karena:

1.Segala hal di WTO adalah tentang perdagangan dan keuntungan semata;

2.WTO bukanlah forum yang demokratis, banyak negara dan kepentingan dipinggirkan oleh perusahaan transnasional, negara-negara maju, dan eksekutif WTO sendiri;

- 3.WTO hanya menguntungkan perusahaan transnasional dan negara-negara maju;
- 4.Masalah subsidi negara-negara maju yang akhirnya menyebabkan ketidakadilan perdagangan dan praktek dumping;
- 5.WTO bukan solusi krisis pangan, krisis iklim dan krisis finansial, malah merupakan penyebabnya!

2. Ketidakadilan di dalam WTO

WTO adalah forum multilateral yang misinya untuk menjalankan perdagangan bebas, saat ini beranggotakan 153 negara yang mayoritas adalah negara-negara miskin dan berkembang. Sejak berdiri pada tahun 1995, selama hampir 14 tahun forum multilateral ini dianggap tidak mewujudkan keadilan—kontras

sekali dengan tujuannya kini dalam Putaran Doha (2001-sekarang). Misi Putaran Doha diklaim secara ambisius untuk “membuat globalisasi semakin inklusif dan menolong rakyat miskin di seluruh dunia dengan cara menihilkan halangan perdagangan dan subsidi pertanian”. Selama 14 tahun ini juga banyak ketidakadilan yang dituding banyak rakyat di seluruh dunia disebabkan oleh lembaga ini. Hingga saat ini, beberapa ketidakadilan yang nyata terlihat dalam WTO adalah:

1.Segala hal di WTO adalah tentang perdagangan dan keuntungan;

Finansialisasi dan liberalisasi membuat semua dinilai dengan uang.

Perdagangan sendiri diperlukan, tapi esensi perdagangan menurut sejarah adalah pemenuhan kebutuhan. Perdagangan sendiri tentunya harus memenuhi kaidah-kaidah yang adil dan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Dalam banyak hal, pertanian bukanlah sekadar komoditas dagang. Yang penting dan utama dari pertanian adalah produk pangan, yang mana merupakan kebutuhan dasar manusia untuk hidup. Karena itu pangan dan pertanian lebih merupakan hak, dan hak tidak bisa dianggap sebagai perdagangan dan komoditas komersil belaka—melainkan harus dihormati dan diolah sebaik-baik dan seadil-adilnya. Pertanian juga merupakan bagian dari budaya

rakyat yang luhur di berbagai belahan dunia, dan untuk itu tidak bisa dinilai dari kertas yang berisikan kontrak-kontrak dan angka-angka.

2. WTO tidak demokratis;

Proses negosiasi WTO tidak didasarkan oleh nilai-nilai demokrasi, terutama musyawarah untuk mufakat dan partisipasi seluruh anggotanya. Perundingan yang terjadi sangat elitis dan tidak melibatkan seluruh anggota, terutama negara-negara miskin dan berkembang. Green Room (Kamar Hijau) adalah istilah dimana staf resmi WTO akan mengajak beberapa anggota saja—seringkali hanya beberapa negara-negara maju—untuk memutuskan

hal di dalam negosiasi sebelum dibawa ke forum resmi. Banyak forum seperti Davos, G8, G20, hingga WTO mini-ministerial sebagai contoh. Indonesia yang diwakili Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, pernah dipinggirkan dalam proses pada tahun 2007-2008. Pada proses terkini, Teks Desember 2008 (yang akan menjadi basis negosiasi lanjutan Putaran Doha) adalah teks hasil keluaran Direktur Jenderal Pascal Lamy, yang notabene mengabaikan masukan-masukan dari negara-negara anggota. Beberapa negosiasi pun dipertukarkan (trade-off), yang tidak masuk akal dan sementara hasilnya akan mengancam kehidupan banyak orang di seluruh dunia.

3. WTO hanya menguntungkan segelintir perusahaan transnasional dan negara maju;

Perusahaan transnasional raksasa melobi negara untuk memajukan kepentingannya (untuk mencari untung) di negosiasi WTO. Perusahaan-perusahaan inilah yang mengambil untung raksasa dari proses perdagangan bebas, dengan penetrasi pasar dan perlindungan yang dihalalkan oleh WTO. Tercatat beberapa perusahaan raksasa seperti Monsanto, Cargill, ADM, Syngenta, dan lainnya. Mereka mengendalikan harga, termasuk mempromosikan model pertanian yang melipatgandakan keuntungan produk paten benih, sarana produksi pertanian

maupun teknologi lain. Negara maju dan perusahaan pengeksport juga diuntungkan karena mereka dapat membuang (dumping) produk pertanian overproduksi mereka—yang disubsidi besar-besaran oleh pemerintah—ke negara-negara lain.

4. Ketidakadilan masalah subsidi pertanian negara maju;

Sekitar US\$128 milyar telah digelontorkan pada tahun 2007 oleh negara-negara Uni Eropa dan AS untuk mensubsidi industri pertanian dan pertanian yang berorientasi ekspor. Dalam kenyataannya subsidi ini malah jatuh kepada perusahaan-perusahaan besar, bukan pula petani kecil. Dengan ini, pertanian di nega-

ra-negara tersebut bisa lebih maju dan produksinya tentunya lebih masif. Hasilnya yang berupa produk murah dibuang dengan harga murah (dumping) ke negara-negara lain, dan menghancurkan pasar dan harga domestik. Hal ini tentunya mempengaruhi kehidupan petani-petani yang menanam produk pertanian yang sama di negara-negara tujuan ekspor tersebut. Akibatnya petani-petani di negara tujuan ekspor, yaitu negara miskin dan berkembang, susah mendapatkan harga yang layak. Pertanian jadi tidak menguntungkan dan banyak yang hidupnya menderita karena hal ini: berutang, miskin, dan bunuh diri, seperti pengalaman di India, Korea dan Indonesia.

5. WTO dan perdagangan bebas bukanlah solusi krisis;

Perdagangan bebas yang berlaku untuk semua bukanlah solusi krisis pangan dan krisis-krisis lainnya, malah merupakan penyebabnya. Dengan perdagangan bebas pertanian, para perusahaan transnasional raksasa dan pemodal besar masuk ke spekulasi produk pertanian, mengakibatkan fluktuasi suplai dan harga di pasar internasional. Meroketnya harga beberapa produk pangan yang dispekulasi mengakibatkan penderitaan bagi rakyat di seluruh dunia. Membuka pasar dan meliberalisasi tidak akan menyelesaikan masalah. Yang dibutuhkan adalah kendali pemerintah untuk

melindungi dan mengendalikan perusahaan transnasional dan pemodal besar (baca: spekulan) agar tidak terlalu bebas. Terlebih lagi, perlindungan terhadap kelompok rentan (terutama petani kecil) dan rakyat secara keseluruhan sangat krusial untuk memastikan keadilan sosial.

Tipologi liberalisasi pertanian yang membunuh dan melanggar hak asasi petani seperti yang terjadi di bawah ini:

1. Penggusuran tanah atau *land grabbing*;
2. Pendapatan atau penghidupan yang tak layak bagi petani kecil dan kaum tak bertanah;

3. Perusakan penghidupan rakyat dan lingkungan;
4. Pangan untuk perdagangan dan spekulasi, bukan untuk kedaulatan dan hak atas pangan;
5. Kriminalisasi perjuangan petani;
6. Pelanggaran hak atas pangan terutama rentan dialami oleh perempuan dan anak-anak di pedesaan;

7. Kehilangan benih lokal dan keanekaragaman hayati;
8. Berkurang atau hilangnya akses pada pelayanan jasa publik seperti kesehatan dan pendidikan di pedesaan;
9. Kelaparan dan malnutrisi;
10. Migrasi terpaksa, harus mencari penghidupan di tempat lain—terutama dialami oleh rakyat pedesaan dan masyarakat adat.

3. Liberalisasi pertanian yang membunuh dan melanggar hak asasi petani

Keamanan dunia bergantung pada kehidupan petani dan keberlangsungan pertanian. Untuk melindungi kehidupan umat manusia sangatlah penting untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi petani. Namun kenyataan-

nya, sejumlah pelanggaran terhadap hak-hak petani terus mengancam kehidupan umat manusia, terutama yang terkait dengan pemberlakuan aturan-aturan WTO dan perdagangan bebas. Beberapa tipologi pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah:

- Jutaan petani telah dipaksa untuk meninggalkan lahan pertanian mereka karena pengambilan lahan yang difasilitasi oleh kebijakan nasional dan/atau militer. Lahan diambil dari petani untuk pembangunan industri skala besar atau proyek-proyek infrastruktur, industri ekstraksi seperti pertambangan, kawasan wisata, kawasan ekonomi khusus, supermarket dan perkebunan untuk menghasilkan *cash crops*

(tanaman yang dijual bukan untuk pangan). Hasilnya, jumlah lahan hanya terkonsentrasi pada beberapa pihak.

- Negara-negara mengabaikan keadaan dimana sektor pertanian dan petani menerima pendapatan yang tak layak dari hasil produksi pertaniannya.

- Tanaman monokultur untuk menghasilkan bahan bakar nabati dan untuk kegunaan industri lainnya didorong demi keuntungan modal agribisnis dan transnasional; hal ini menyebabkan kerusakan hutan, air, lingkungan, dan kehidupan sosial ekonomi petani.

- Meningkatnya penggunaan pangan untuk tujuan-tujuan spekulasi.

- Kriminalisasi perjuangan petani.

- Hak-hak perempuan dan anak-anak adalah yang paling terkena dampak. Perempuan adalah korban kekerasan psikologis, fisik dan ekonomi. Mereka didiskriminasi dari akses terhadap tanah dan sumber-sumber produktif, serta dipinggirkan dalam proses pembuatan keputusan—terutama terkait dengan peraturan perdagangan dan penggunaan input pertanian.

- Petani telah kehilangan banyak benih-benih lokal. Keanekaragaman hayati dihancurkan oleh penggunaan pupuk kimia, benih-benih hibrida dan organisme-organisme yang dimodifikasi secara genetika (transgenik atau GMOs), yang dikem-

bangkan oleh perusahaan-perusahaan transnasional.

- Berkurangnya akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah pedesaan serta peran petani dalam politik dikurangi.

- Sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak petani, saat ini jutaan petani hidup dalam kelaparan dan malnutrisi. Hal ini bukan karena jumlah pangan yang ada di dunia tidak cukup, tapi karena sumber-sumber pangan didominasi oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Petani dipaksa untuk menghasilkan pangan untuk ekspor daripada menghasilkan pangan untuk masyarakatnya.

- Krisis dalam sektor pertanian menyebabkan perpindahan

(migrasi) dan terusir serta hilangnya petani dan masyarakat adat dalam jumlah besar.

Pelanggaran hak asasi petani juga cenderung meningkat dikarenakan penerapan kebijakan yang didorong oleh WTO dan berbagai kesepakatan perdagangan bebas. Secara gamblang, WTO memaksa pembukaan pasar dan mencegah negara-negara untuk memberikan proteksi dan dukungan terhadap pertanian domestiknya.

Mereka juga mendorong deregulasi dalam sektor pertanian. Pemerintah negara-negara maju dan perusahaan-perusahaan transnasional bertanggung jawab atas prak-

tek-praktek perdagangan *dumping* bertahun-tahun lamanya. Pangan murah bersubsidi membanjiri pasar lokal yang selanjutnya menyebabkan petani bangkrut.

WTO dan lembaga internasional lainnya memaksakan industrialisasi pangan, dan pengenalan pangan seperti tanaman transgenik (GMOs) dan penggunaan hormon pertumbuhan yang tidak aman dalam produksi daging. Sementara itu, mereka melarang pemasaran produk-produk sehat yang dihasilkan oleh petani dan nelayan Indonesia melalui hambatan-hambatan kesehatan (*sanitary barriers*). Didukung oleh Dana Moneter Internasional (IMF), liberalisasi telah membawa kita pada pemo-

tongan subsidi untuk pertanian dan pelayanan sosial. Negara-negara telah dipaksa untuk memprivatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan untuk melepaskan mekanisme dukungan pemerintah dalam sektor pertanian.

Kebijakan-kebijakan nasional dan internasional, secara langsung maupun tidak, memberikan prioritas bagi perusahaan-perusahaan transnasional atau produksi pangan dan perdagangan. Perusahaan-perusahaan transnasional juga melakukan pembajakan makhluk hidup (*biopiracy*) dan menghancurkan sumber-sumber genetika serta keanekaragaman hayati yang diolah oleh petani. Logika kapitalis tentang akumulasi

modal telah mengacaukan pertanian yang umumnya berskala kecil.

**PEMERINTAH INDONESIA
MAKIN TAK BERDAYA
SETELAH 14 TAHUN DI BAWAH
KETIAK LIBERALISASI
PERDAGANGAN.**

Kita tergantung impor: Gula,
kita masih mengimpor dan
ketergantungannya mencapai
30 persen dari kebutuhan
nasional.

Untuk susu dan produknya kita bahkan masih tergantung pada impor hingga 70 persen.

Garam ketergantungan impornya sebesar 50 persen. Sementara itu, untuk kedelai kita bergantung pada impor sebesar 45 persen, daging sebesar 28 persen dan jagung 15 persen.

4. Menuju KTM 7 WTO: Pemerintah tak berdaya melawan liberalisasi

Pemerintah Indonesia, bersama dengan negara-negara berkembang dalam kelompok G33, berusaha mengajukan usulan Produk Khusus dan Mekanisme Perlindungan Khusus (SP/SSM). Sejak 2003, proposal ini menjadi batu sandungan dalam pe-

rundingan Putaran Doha. Namun, selain itu juga, proposal ini semakin lama semakin lemah dan semakin liberal. Walaupun dimaksudkan untuk memproteksi petani, terutama yang ada negara berkembang, proposal ini tentunya masih kurang dari cukup bagi kehidupan petani kecil sehari-hari. Pada teks Desember 2008, teks ini semakin lemah dan pemerintah Indonesia terlihat sangat mengakomodasi kepentingan negara-negara maju demi dirampungkannya Putaran Doha.

Di tingkat nasional, tingkat ketergantungan yang terus-menerus terhadap impor pangan membuat pertanian kita jalan di tempat. Tawaran rakyat dan mandat konstitusi,

pembaruan agraria, tak kunjung dilaksanakan dengan meredistribusi tanah-tanah subur untuk pertanian. Saat ini ekonomi neoliberal—yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi dan skala ekonomis—telah dan akan terus mendorong aktor-aktor besar seperti perusahaan transnasional dan sektor swasta.

Hal ini terlihat dari tidak adanya cetak biru pertanian dan industri di pedesaan. Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (RPPK) yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2006 lalu pun tidak secara sistematis memecahkan masalah. Yang terjadi di lapangan adalah pertanian berskala besar, berorientasi ekspor, terutama perkebunan dan

food estate, yang akan didukung. Petani kecil yang merupakan mayoritas dibiarkan tak berdaya menghadapi masalah kompleks: mulai dari akses dan hak atas tanah, permodalan dan kredit, teknologi pertanian, hingga pasca produksi. Apalagi pasar dan harga domestik sudah terdistorsi pasar internasional, yang membuat produk pertanian dari petani kecil susah bersaing dengan produk global.

**KEDAULATAN PANGAN
MERUPAKAN HAK SETIAP
ORANG, MASYARAKAT DAN
NEGARA** untuk mengakses dan
mengendalikan aneka sumber-
daya produktif serta menentu-
kan dan mengendalikan sistem
(produksi, distribusi, konsumsi)
pangan sendiri sesuai kondisi
ekologis, sosial, ekonomi, dan
budaya khas masing-masing.

5. Alternatif kedaulatan pangan menghempang WTO

Kedaulatan pangan (*food sovereignty*) adalah konsep yang diajukan oleh La Via Campesina pada tahun 1996 sebagai alternatif terhadap ketahanan pangan (*food security*) dan liberalisasi di bidang pertanian dan pangan yang mulai digalakkan pada

kurun waktu tersebut.

Kedaulatan pangan merupakan hak setiap orang, masyarakat dan negara untuk mengakses dan mengendalikan aneka sumberdaya produktif serta menentukan dan mengendalikan sistem (produksi, distribusi, konsumsi) pangan sendiri sesuai kondisi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya khas masing-masing.

Secara umum dan global, yang ingin diperjuangkan oleh rakyat untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah:

- Perlawanan yang menyeluruh terhadap imperialisme, neo-liberalisme, neo-kolonialisme dan sistem patriarki, serta semua sistem yang memiskinkan kehidupan, sumberdaya dan ekosistem, serta agen-agen yang mempromosikan hal-hal tersebut seperti lembaga keuangan internasional, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perjanjian perdagangan bebas, perusahaan-perusahaan transnasional dan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyatnya;
- Ditiadakannya praktek *dumping* produk pangan dengan harga di bawah ongkos produksi dalam perekonomian global;
- Dominasi sistem pangan dan produksinya oleh perusahaan yang mengutamakan keuntungan

dibandingkan rakyat, kesehatan dan lingkungan;

- Melawan teknologi dan praktek-praktek yang menghancurkan kemampuan produksi pangan kita di masa depan, merusak lingkungan dan membahayakan kesehatan rakyat. Termasuk tanaman dan ternak transgenik, teknologi ‘terminator’, industri perairan, praktek-praktek perikanan yang merusak, yang disebut revolusi putih dalam industri pengolahan susu, Revolusi Hijau yang “lama” dan “baru”, serta “Gurun Hijau” (*Green Deserts*) dari industri monokultur *biofuel* (bahan bakar nabati *agrofuel*), serta perkebunan lainnya;

- Menolak privatisasi dan komodifikasi bahan pangan, pelayanan

publik, pengetahuan, lahan, air, bibit, ternak serta warisan alamiah lainnya;

- Melawan proyek/model pengembangan dan industri ekstraktif (pertambangan) yang menggusur masyarakat dan menghancurkan lingkungan dan warisan alam;

- Memperjuangkan agar tidak ada praktek kriminalisasi terhadap rakyat yang berjuang untuk melindungi dan membela hak – haknya;

- Menolak bantuan pangan (*food aid*) yang menyamarkan *dumping*, pengenalan GMO pada lingkungan lokal dan sistem pangan yang menciptakan pola-pola penjajahan gaya baru;

- Penolakan terhadap internasionalisasi dan globalisasi dari

sistem paternalistik dan nilai-nilai patriarkal yang memarginalkan perempuan, dan membeda-bedakan kaum tani, masyarakat adat, nelayan dan penggembala diseluruh dunia;

- Semua orang, bangsa dan negara mampu untuk menentukan sistem produksi pangan dan kebijakan-kebijakan mereka sendiri yang dapat menyediakan bagi semua orang pangan yang berkualitas, cukup, terjangkau, sehat dan layak secara kultural;

- Pengakuan dan penghormatan bagi peran dan hak-hak perempuan dalam produksi pangan, dan melibatkan perempuan dalam berbagai mekanisme pengambilan keputusan;

- Setiap orang di negara masing-masing mampu untuk hidup layak, memperoleh upah layak untuk pekerjaan dan memiliki kesempatan untuk mempertahankan tempat tinggal;
 - Pengakuan bahwa kedaulatan pangan adalah hak asasi manusia yang mendasar, diakui dan diterapkan oleh masyarakat, warga, negara dan lembaga-lembaga internasional;
 - Kemampuan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan pedesaan, persediaan sumber daya perikanan, tata ruang, dan tradisi pangan berbasiskan pengaturan lingkungan yang berkelanjutan bagi lahan, tanah, air, laut, bibit, ternak dan keanekaragaman hayati lainnya;
 - Penghargaan, pengakuan

dan penghormatan terhadap keragaman rakyat dalam pengetahuan tradisional, pangan, bahasa dan budaya, serta cara-cara pengaturan dan pengekspresian diri;

- Reforma agraria sejati dan integratif; yang menjamin hak-hak petani atas lahan secara penuh, membela dan mengembalikan wilayah masyarakat adat, menjamin akses masyarakat nelayan dan menguasai wilayah perikanan mereka beserta ekosistemnya, menghormati akses dan penguasaan atas lahan penggembalaan serta rute migrasi, menjamin pekerjaan yang layak dengan upah yang layak serta hak-hak pekerja bagi semua, serta masa depan bagi pemuda di pedesaan;...di mana reforma agraria merevitalisasi

interdependensi antara produsen dan konsumen, menjamin kelangsungan hidup masyarakat, keadilan ekonomi dan sosial serta keberlanjutan ekologis, dan menghormati otonomi lokal dan pemerintahan dengan hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan...dimana terdapat jaminan hak atas wilayah dan hak untuk menentukan sendiri nasib masyarakatnya;

- Kekuatan rakyat untuk mengambil keputusan terhadap warisan harta, alam dan spiritual senantiasa diperjuangkan;

- Setiap rakyat memiliki hak untuk mempertahankan wilayahnya dari tindakan-tindakan perusahaan transnasional;

Alternatif-alternatif kedaulatan pangan ini telah kami lakukan selama ini di tingkatan lokal, nasional, regional, bahkan internasional. Di tingkatan lokal kami membangun kawasan-kawasan yang mempraktekkan pertanian agroekologi berkelanjutan berbasis keluarga tani, sementara di tingkat pascaproduksi dikreasikan koperasi-koperasi dan unit-unit usaha kecil mandiri yang berprinsip pada keadilan perdagangan—yang pada satu sisi memberikan harga yang pantas bagi ongkos produksi dan keuntungan produsen, dan di sisi lain tetap tidak memberatkan konsumen.

Praktek-praktek gerakan rakyat ini tersebar di seluruh pulau-pulau

dan telah melampaui batasan desa-kota. Walaupun belum secara masif, nasional dan didukung penuh oleh pemerintah, kami percaya bahwa sistem berdasarkan kedaulatan pangan dan prinsip-prinsip keadilan sosial, keadilan gender dan keadilan ekologi inilah yang akan menjamin masa depan rakyat dan planet bumi. Seluruh rakyat harus bahu-membahu untuk mewujudkan sistem pertanian, pangan dan perdagangan yang adil.

ALTERNATIF-ALTERNATIF
KEDAULATAN PANGAN INI
TELAH KAMI LAKUKAN DI
TINGKATAN LOKAL, NASIONAL,
REGIONAL, BAHKAN INTERNA-
SIONAL.

Di tingkatan lokal kami
membangun kawasan-kawasan
yang mempraktekkan
pertanian agroekologi
berkelanjutan berbasis keluarga
tani,

sementara di tingkat pascaproduksi dikreasikan koperasi-koperasi dan unit-unit usaha kecil mandiri yang berprinsip pada keadilan perdagangan—yang pada satu sisi memberikan harga yang pantas bagi ongkos produksi dan keuntungan produsen, dan di sisi lain tetap tidak memberatkan konsumen.

6. Agenda menuju KTM 7 WTO

1. Konsolidasi dan diskusi gerakan sosial; mulai dari update terkini negosiasi di WTO, sekitar praktek perlawanan, aksi dan alternatif yang dilakukan, dan konsolidasi gerakan sosial dalam isu perdagangan;

2. Aksi-aksi yang terus menerus dilakukan untuk pendidi-

kan publik, mengambil opini publik dan kampanye, serta wujud nyata perlawanan terhadap perdagangan yang tidak adil di bawah ketiak WTO;

3. Pendidikan-pendidikan yang dilakukan di basis, mulai dari tingkat lokal maupun nasional untuk terus berusaha mengerti dan memasifkan perlawanan perjuangan rakyat;

4. Alternatif-alternatif nyata yang dilakukan mulai dari pembangunan sistem produksi pertanian berkelanjutan agroekologi yang berbasis keluarga tani; koperasi dan pembangunan unit usaha serta pasar lokal; direct-selling antara produsen dan konsumen; pengajuan konsep-konsep untuk sistem pertanian, pan-

gan dan perdagangan yang adil di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional;

GALERI FOTO



Massa aksi La Via Campesina (organisasi petani internasional) menggunakan traktor sebagai perlengkapan aksi menolak KTM WTO di Jenewa, Swiss, 2009 lalu

USIR WTO DARI PERTANIAN

Perjuangan Rakyat Menuju KTM VII WTO



Massa aksi dari KWPA (*Korean Women Peasant Association*-Asosiasi Petani Wanita Korea) yang juga merupakan aliansi SPI (Serikat Petani Indonesia) dan anggota La Via Campesina menggelar spanduk menentang WTO pada KTM WTO VII di Jenewa, Swiss



Massa aksi dari *Nouminren Shokkenrei Japan* (SPI-nya Jepang) yang juga ikut dalam aksi menentang KTM VII WTO di Jenewa, Swiss.

USIR WTO DARI PERTANIAN

Perjuangan Rakyat Menuju KTM VII WTO



Muhammad Ikhwan dan Cecep Risnandar dari SPI yang ikut dalam aksi global La Via Campesina menolak WTO dalam KTM VII WTO di Jenewa, Swiss, 2009 lalu.



Aksi simpatik menyalakan lilin dari La Via Campesina yang menolak bangkitnya WTO dalam KTM VII WTO yang lalu.



SERIKAT PETANI INDONESIA

Jl. Mampang Prapatan XIV No. 5

Jakarta Selatan 12790

Telp. 021-7991890 Fax. 021-7993426

email: spi@spi.or.id

www.spi.or.id